



RENCANA KERJA

RENJA 2020

INSPEKTORAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan mengacu RKPD Tahun 2020 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022, maka disusunlah Renja SKPD Tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Inspektorat DIY Tahun 2020.

Yogyakarta, 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-2
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2 Capaian Kinerja	2-1
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-3
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-3
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-1
3.2 Program dan Kegiatan	3-1
3.3 Program dan Kegiatan	3-3
BAB 4 PENUTUP.....	4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-2
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-6
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah 2-4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (common goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2020 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat DIY Tahun 2020 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan RKPD, Inspektorat DIY menyusun Rancangan Renja SKPD Tahun 2020 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun 2018

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab 4 Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mewujudkan *good governance* telah dituangkan dalam Renstra dan penjabaran perencanaan tahun melalui Renja Inspektorat. Sasaran strategis Inspektorat dalam Renstra 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator kinerja yang ditetapkan menurunnya temuan hasil pemeriksaan.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai yang telah dilaksanakannya suatu program/kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun 2018 ditetapkan satu sasaran strategis, satu indikator kinerja, 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2018 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp14.456.093.419,00 atau 95,29% dari alokasi anggaran Rp15.169.897.791,00. Anggaran tersebut terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp5.316.937.224,00 dan belanja langsung sebesar Rp9.852.960.567,00.

Pencapaian hasil realisasi kinerja tahun 2018 sesuai indikator kinerja kegiatan dan target pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1. Pencapaian Hasil Kinerja Tahun 2018

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	100%
01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya penggandaan dokumen dokumen - Tersedianya barang cetakan - Terbayarkannya Pajak/STNK kendaraan - Terbayarkannya Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 - Penyediaan Jasa kebersihan gedung kantor - Penyediaan retribusi sampah kantor - Tersedianya Paket pengiriman - Terbayarkannya tagihan internet up to 2 MBps - Terbayarkannya Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m³ - Tersedianya Pengisian tabung pemadam kebakaran - Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Tersedianya Pengiriman surat khusus perangko - Tersedianya Pembelian Meterai 	54.450 lembar 7 jenis 15 unit 5 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 buah 3 jenis 300 surat 360 lembar	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Komponen instalasi listrik dan - Tersedianya Alat tulis kantor - Tertatinya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 jenis 19 jenis 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100%
01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja 9 orang keamanan kantor sesuai dengan SPK - Kinerja 9 orang pengelola keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 100% 100%
01.035.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik - Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
02.107	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor	Tersedia DED gedung tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan	100%
02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 	<ul style="list-style-type: none"> 3 jenis 9 unit 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%
02.112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD - Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 	<ul style="list-style-type: none"> 15 unit 5 unit 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
05.001.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Orang 2 angkatan 55 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	100%
06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP A	Nilai LKJIP A
06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	- Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2% pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	100%
06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan	- Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD - Dokumen Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen 4 dokumen	100% 100%
06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	- Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan 100%	100%
06.021	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA 2 periode @ 50 orang dalam 1 tahun	2 periode @ 50 orang	100%
038.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100 %	100%
038.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	- Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY - Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	190 LHP 41 laporan 41 laporan 41 laporan 1 laporan 41 laporan	100% 100% 100% 100% 100% 100%
038.003.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Laporan Triwulan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2017 - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Paket Perjanjian Kerjasama APIP dan APH	4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 Paket	100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
038.007.	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	- Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019	1 SK Gubernur	100%
038.009.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota	100%
038.010.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	4 Kali	100%
038.011.	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	- Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS - Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	5500 PNS Gol IV dan Gol III 95 %	100%
038.014.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	26 LHP	100%

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja s.d. 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tabel2-2RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenjaInspektorat danPencapaianRenstraInspektorat s/d Tahun 2018Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Lembar : 1

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Tar... da... (Re... Da...
						Target Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)		
1	Urusan Pemerintahan								
1 01	Bidang Urusan Pemerintahan								
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 01 01 01	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatinya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Alat tulis kantor 19 jenis							
		Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor 12 jenis							
		Pembelian Meterai							
		Pengiriman surat khusus perangko							
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih							

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)				
		Pengisian tabung pemadam kebakaran									
		Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3									
		Langganan 4 jenis surat kabar harian									
		Tagihan internet up to 2 MBps									
		Paket pengiriman									
		Retribusi sampah kantor									
		Jasa kebersihan gedung kantor									
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2									
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4									
		Barang cetakan									
		Penggandaan dokumen dokumen									
		Fumigasi arsip									
		Pembelian buku									
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai						

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

					peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 9 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
1	01	01	03	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun							

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.13%	99.87%
1	01	02	107	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor/Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.02%	99.98%
1	01	02	108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	100%	-	-	-	-	-	-	-
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis								
					Meubeleir sesuai RKBMD 2 jenis								
1	01	02	109	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Perawatan garasi kendaraan dinas 150 m2,	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	AC Split sesuai RKBMD 30 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12.97%	87.03%
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 13 jenis								
1	01	02	113	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11.14%	88.86%
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 15 unit								
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19.20%	80.80%
1	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 10	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	01	05	003	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat : 5 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12.59%	87.71%
					Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek : 2 angkatan 55 org								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	05	007	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47.27%	52.73%
1	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60.82%	39.18%
1	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49.65%	50.35%
1	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 6 program 22 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.15%	66.85%
1	01	06	018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64.35%	35.65%
					Dokumen draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022								
1	01	06	019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	38		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14.44%	85.56%
1	01	38	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16.08%	83.92%
					Laporan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016								
					Laporan Evaluasi LKjiP								
					Laporan Hasil Pendampingan								
					Laporan Review Laporan Keuangan SKPD DIY								
					Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY								
					Laporan Review RKA SKPD DIY								
					Laporan Monev SPIP SKPD								
					Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi								
					Laporan Pendampingan Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY SKPD								
					Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD								
					Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD								
					Consulting dan Quality Assurance Pengawasan SKPD								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	38	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13,67%	86,33%
					Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah								
					Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018								
					Laporan Triwulan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu								
1	01	38	007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1	01	38	009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.16%	84.84%
1	01	38	010	Gelar PengawasanDaerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%
1	01	38	011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.59%	84.41%
					Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS 5500 PNS								
1	01	38	014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.11%	91.89%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 190 obyek pemeriksaan, melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2018 terhadap 41 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2018 terdapat 933 rekomendasi BPK dan telah ditindak lanjuti sejumlah 706 (75,66%), rekomendasi Inspektorat sebanyak 754 rekomendasi selesai ditindaklanjuti 689 (91,37%) serta rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemendagri sebanyak 11 rekomendasi, selesai ditindaklanjuti 11 (100%).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY tahun 2018 telah melakukan :

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Melakukan Evaluasi LKJiP Pemda DIY.
- d. Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY

- e. Reviu Dokumen Perencanaan SKPD Pemda DIY
- f. Reviu RKA SKPD DIY
- g. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- h. Evaluasi LKJiP Kabupaten/ Kota
- i. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

- a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. *Consulting* dan *Quality Assurance*.
- d. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- e. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Pada tahun 2018 Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan- kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Derah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

- f. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Menteri Dalam Negeri.
- g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
- h. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.
- i. Melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkerjasama dengan Irwasda POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Ombudsman DIY dan Badan Intelijen Negara Daerah DIY.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 16 (3) disebutkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

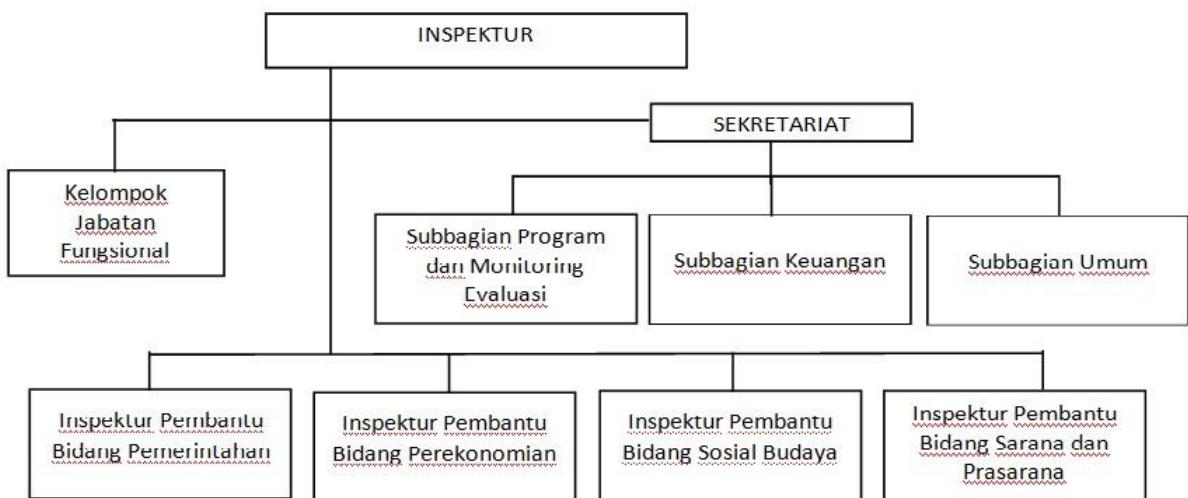
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategi nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada BAB II Pasal 9 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Pimpinan : Inspektur
2. Inspektur Pembantu : Terdiri dari 4 Inspektur Pembantu Bidang :
 - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
 - Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
 - Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
 - Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
3. Sekretariat : Terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Data Keuangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Inspektorat DIY



2.4.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat pada BAB III Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Selanjutnya pada pasal 5, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- g. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.4.2. Keadaan Pegawai

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang pada akhir tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	40
		P2UPD	12
3	Fungsional Umum	Staf	18
	Jumlah		79

2.4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

- a. Gedung : 1 unit
- b. Kendaraan roda 4 : 13 unit
- c. Kendaraan roda 2 : 4 buah
- d. Komputer yang dapat digunakan : 40 buah
- e. Laptop yang dapat digunakan : 22 buah
- f. Notebook : 6 buah
- g. AC yang dapat digunakan : 41 buah

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Gedung yang ada terdiri dari 2 unit, 1 unit gedung induk dan 1 unit gedung arsip/perpustakaan. Pada tahun triwulan I Tahun 2019 Gedung Induk sudah dirobohkan dan pembangunan gedung Inspektorat dimulai bulan April 2019. Untuk sementara mulai bulan Desember 2018 Inspektorat DIY menempati Gedung milik Badan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY di Komplek Youth Centre, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

2. Untuk kendaraan dinas operasional (roda 4) pemeriksaan dari 13 unit kendaraan tersebut, 1 (unit) kendaraan roda 4 merupakan kendaraan dinas Eselon II. Hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran ketika melakukan pemeriksaan ke seluruh SKPD/UPTDPemda DIY yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Kendaraan dinas roda 2 digunakan oleh caraka.
3. Lap top yang dimiliki Inspektorat DIY sebanyak 22 unit, terdapat 19 unit merupakan pengadaan tahun 2008 dan 2009 yang sering mengalami kerusakan sehingga menghambat dalam penyusunan LHP dan biaya pemeliharaan yang tinggi.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, Inspektorat DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

Sebagaimana visi Pembangunan DIY “**Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**” .

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui **dua misi pembangunan daerah** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**
- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, tujuannya adalah terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian ditetapkan sasarnya adalah meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal.

Sedangkan sasaran program 01 s.d 06 adalah **Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran OPD.**

3.2. Program dan Kegiatan

a. Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat DIY pada tahun anggaran 2020 ada 5 (lima) sebagai berikut :

- 1) Program Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Pemerintahan

b. Kegiatan.

Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.677.976.090,00. Belanja Langsung 5(lima) Program 19(sembilan belas) kegiatan dengan rencana anggaran Rp25.824.668.000,00. Sehingga Total Anggaran sebesar Rp31.502.644.090,00.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
2. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran;
3. Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi;
4. Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;
7. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
8. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu;
9. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
11. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD;
13. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
14. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
15. Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
16. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
18. Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
19. Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 3-1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			4,045,086,000				1,870,000,000
01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatinya Arsip Aktif / In Aktif Alat tulis kantor Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor Pembelian Meterai Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Langganan 4 jenis surat kabar harian Pengisian tabung pemadam kebakaran Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 Tagihan internet up to 2 MBps Paket pengiriman Retribusi sampah kantor Jasa kebersihan gedung kantor Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 Barang cetakan Penggandaan dokumen2	DIY	12 bulan 13 jenis 6 jenis 320 lembar 6 jenis 12 bulan 3 buah 12 bulan 12 bulan 4 unit 13 unit 9 jenis 71.360 lembar	376,983,000	APBD		12 bulan 15 jenis 8 jenis 320 lembar 6 jenis 12 bulan 3 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 13 unit 9 jenis 73.000 lembar	450,000,000
01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK Kinerja 5 orang pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	DIY	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	601,763,000	APBD		Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	670,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)				Catt Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.035.	Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun Koordinasi dan pelaksanaan pemeriksaan OPD dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik dalam 1 th	DIY dan Luar DIY	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	3,066,340,000	APBD		Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	750,000,000
'02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				19,984,752,000				1,195,000,000
02.107.	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m ²	DIY	Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja Tahap II 100%	18,750,001,000	APBD	-	-	-
02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Komputer sesuai RKBMD 2 jenis Meubelair sesuai RKBD 7 Jenis Alat Studio sesuai RKBMD 2 jenis	DIY	11 unit 479 unit 8 unit	1,053,912,000	APBD	-	15 unit	960,000,000
02.111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	DIY	1 jenis 8 jenis	41,100,000	APBD	-	1 jenis 6 jenis	35,000,000
02.112	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	DIY	4 unit 13 unit	139,739,000	APBD		4 unit 13 unit	200,000,000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				177,834,000				210,000,000
05.007.	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	DIY	2 periode @ 70 orang	6,184,000	APBD		2 periode @ 75 orang	30,000,000
05.072	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	DIY	10 orang 4 angkatan 70 orang	171,650,000	APBD		8 orang 4 angkatan 75 orang	180,000,000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				86,324,000				107,000,000
06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	DIY	Nilai LKjIP A	2,114,000	APBD		Nilai LKjIP A	3,000,000
06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	DIY	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	3,468,000	APBD		Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	4,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	DIY	Forum Perencanaan OPD 1 kali Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	77,028,000	APBD		Forum Perencanaan OPD 1 kali Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	95,000,000
06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan	DIY	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan 100%	3,714,000	APBD		Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan 100%	5,000,000
038.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pemerintahan				1,501,791,000				8,950,000,000
38.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Regular Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY Peer Review antar Inspektorat Provinsi Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY Pengelolaan Dana Keistimewaan Evaluasi Maturitas SPIP Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	DIY dan Luar DIY	190 LHP 37 LHE 1 Laporan 37 Laporan 1 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan	274,573,000	APBD		190 LHP 37 LHE 1 Laporan 37 Laporan 1 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan	6,800,000,000
38.016.	Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 Laporan Triwulan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2020	DIY	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 SK Gubernur	713,531,000	APBD		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 SK Gubernur	1,200,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
38.009.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	DIY	5 laporan	30,540,000	APBD		5 laporan	350,000,000
38.010.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi hasil pengawasan rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	DIY	1 Laporan 3 laporan	99,407,000	APBD		1 Laporan 3 laporan	110,000,000
38.011.	Monitoring, Evaluasi dan Inv entarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	DIY	100%	11,170,000	APBD		100%	40,000,000
38.014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	DIY	50 LHP	372,570,000	APBD		55 LHP	450,000,000

BAB 4 PENUTUP

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Inspektorat DIY mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Mengacu pada Rancangan RKPD tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah merencanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.677.976.090,00. Belanja Langsung 5 (lima) Program 19(sembilan belas) kegiatan dengan anggaran Rp25.824.668.000,00. Sehingga Total Anggaran sebesar Rp31.502.644.000,00.

Yogyakarta, 2019



RENCANA KERJA

RENJA 2020



**INSPEKTORAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi,
Mlati, Sleman